



Pengukuran Kinerja RPJMD dalam Mendukung Capaian Sustainable Development Goals Pilar Lingkungan

Bofandra Muhammad¹, Suhairi Suhairi²

¹Universitas Andalas, Padang, Indonesia, 2220532014_bofandra@student.unand.ac.id

²Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

Corresponding Author: 2220532014_bofandra@student.unand.ac.id¹

Abstract: *This study aims to measure the performance of the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) of Pesisir Selatan Regency for the period 2021–2026 in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) on the environmental development pillar. Using a qualitative approach with a qualitative descriptive, this study analyzed the synchronization of RPJMD performance targets with SDGs environmental pillar targets (Goals 6, 11, 12, 13, 14, and 15), evaluated the realization of aligned targets, and assessed their performance. Data were collected through document analysis of the RPJMD, LKIP, LPPD, and LKPJ, then analyzed using a performance assessment matrix measuring four variables: availability of plan (R), budget (A), program (P), and result (H). The findings show that of 56 SDGs environmental pillar targets, 27 targets (48.21%) are synchronized with the RPJMD. From a performance perspective, 29 targets (51.79%) were not planned, 3 targets (5.36%) were planned but not budgeted/programmed, 9 targets (16.07%) were planned, budgeted, and programmed but results not measured, 13 targets (23.21%) were measured but not optimal, and only 2 targets (3.57%) were measured optimally. Factors influencing performance include internal factors (priority-setting processes, indicator measurement gaps, organizational commitment, data limitations, and regional authority constraints) and external factors (community participation, fiscal limitations, natural disasters, and geographical conditions).*

Keywords: *Performance Measurement, RPJMD, SDGs, Environmental Development Pillar*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengukur kinerja pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan periode 2021–2026 dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) pada pilar pembangunan lingkungan. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis sinkronisasi target kinerja RPJMD dengan target SDGs pilar lingkungan (Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15), mengevaluasi realisasi target yang telah diselaraskan, serta menilai kinerjanya. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen RPJMD, LKIP, LPPD, dan LKPJ, kemudian dianalisis menggunakan matriks penilaian kinerja yang mengukur empat variabel: ketersediaan rencana (R), anggaran (A), program (P), dan hasil (H). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 56 target SDGs pilar lingkungan, terdapat 27 target (48,21%) yang tersinkronisasi dengan RPJMD. Dari perspektif penilaian kinerja, 29 target (51,79%) tidak direncanakan, 3 target (5,36%) direncanakan namun tidak dianggarkan/diprogramkan, 9 target (16,07%)

direncanakan, dianggarkan, diprogramkan namun hasil tidak diukur, 13 target (23,21%) telah diukur namun belum optimal, dan hanya 2 target (3,57%) yang diukur secara optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja meliputi faktor internal (proses penentuan prioritas, kesenjangan pengukuran indikator, komitmen organisasi, keterbatasan data, dan kewenangan daerah) serta faktor eksternal (partisipasi masyarakat, keterbatasan fiskal, bencana alam, dan kondisi geografis).

Kata Kunci: Pengukuran Kinerja, RPJMD, SDGs, Pilar Pembangunan Lingkungan

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu faktor kritis dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun (Siregar, 2022). Dokumen RPJMD memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja masing-masing.

Pengukuran kinerja pelaksanaan RPJMD menjadi penting untuk memastikan tercapainya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Janjua et al. (2019) menyatakan bahwa manajemen kinerja merupakan sistem yang menetapkan informasi dan data kinerja melalui proses yang bergantung pada perencanaan strategis dan pengukuran kinerja untuk menghubungkan data kinerja dengan posisi pengambilan keputusan. Sementara itu, Roge dan Lennon (2018) menegaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan alat dan metode yang bertujuan mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis berkaitan dengan konsep efektivitas dan efisiensi. Dengan adanya pengukuran, analisis, dan evaluasi terhadap data kinerja, pemerintah dapat menentukan cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan, sekaligus memberikan informasi objektif kepada publik mengenai pencapaian hasil yang diperoleh.

Sebagai bagian dari komunitas global, daerah memainkan peran penting dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang harus dicapai dalam periode 2016 hingga 2030 (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2015). Pilar pembangunan lingkungan dalam SDGs mencakup enam tujuan, yaitu: Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab), Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), Tujuan 14 (Ekosistem Lautan), dan Tujuan 15 (Ekosistem Daratan), dengan total 56 target kinerja. Di Indonesia, kewajiban pelokalan SDGs ke dalam dokumen perencanaan daerah dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang mewajibkan sinergi antara RPJMD dengan target-target SDGs.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten dengan karakteristik geografis yang khas: wilayah pesisir sepanjang 220 km, kawasan perbukitan dan hutan lindung yang luas, serta kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi. Karakteristik ini menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sangat relevan sebagai objek kajian pencapaian SDGs pilar lingkungan. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026 menetapkan visi “Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”, dengan salah satu sasaran eksplisit yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu Sasaran 3.1.5: Terjaminnya Kelestarian Lingkungan, yang diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kim et al. (2017) menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menyajikan deskripsi langsung terhadap suatu fenomena tanpa melakukan interpretasi yang terlalu mendalam atau membangun teori baru. Adapun fokus utama penelitian ini adalah menggambarkan karakteristik suatu fenomena berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun analisis dokumen.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen. Dokumen primer yang digunakan meliputi: (1) dokumen SDGs yaitu Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development beserta Metadata SDGs Indonesia yang memuat 56 target kinerja pilar lingkungan; (2) RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026 sebagai dokumen perencanaan utama; (3) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dan 2023; (4) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022; serta (5) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Triangulasi dilakukan melalui wawancara dengan pejabat di Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bapperida), Dinas Perikanan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

Analisis data dilakukan menggunakan matriks penilaian kinerja yang diadaptasi dari Elmizan (2020) dengan mengukur empat variabel utama: Rencana (R), Anggaran (A), Program (P), dan Hasil (H). Setiap variabel diukur menggunakan skala dummy (0 = tidak tersedia, 1 = tersedia). Variabel Hasil (H) menggunakan dua digit: H=11 bila capaian optimal ($\geq 90\%$ dari target), H=10 bila ada pengukuran namun belum optimal ($< 90\%$), dan H=00 bila tidak ada data pengukuran capaian. Berdasarkan kombinasi nilai variabel R-A-P-H, setiap target SDGs pilar lingkungan dikategorikan ke dalam salah satu dari lima kategori penilaian kinerja, mulai dari Kategori 1 (tidak direncanakan) hingga Kategori 5 (direncanakan, dianggarkan, diprogramkan, dan diukur secara optimal).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pantai barat Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 6.049,34 km² yang terdiri dari 15 kecamatan dan 182 nagari. Kabupaten ini memiliki garis pantai sepanjang sekitar 220 km yang menjadikannya salah satu daerah dengan kawasan pesisir terluas di Sumatera Barat, sekaligus menempatkan isu-isu pengelolaan ekosistem laut dan pesisir sebagai agenda strategis yang tidak dapat diabaikan (LPPD Kabupaten Pesisir Selatan, 2022). Karakteristik wilayah yang beragam—meliputi kawasan pesisir, dataran rendah pertanian dan permukiman, serta kawasan perbukitan dan hutan lindung—menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sangat relevan dengan isu-isu SDGs pilar lingkungan.

Berdasarkan data LKIP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, perekonomian daerah didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, dengan nilai PDRB (ADHK) pada tahun 2022 mencapai Rp10,183 triliun. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,14% melampaui target 4,65% (capaian 110,54%), sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,24 dari target 70,59 (102,34%). Di sisi lain, tingkat kemiskinan masih tercatat 7,34% di bawah target 6,9% (capaian 93,62%), mencerminkan masih adanya tantangan dalam pemerataan kesejahteraan yang berdampak pada kapasitas masyarakat mengakses layanan dasar lingkungan.

Sinkronisasi RPJMD dengan Target SDGs Pilar Lingkungan

Dari total 56 target SDGs pada pilar lingkungan (Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15), penelitian ini menemukan 27 target (48,21%) yang tersinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten

Pesisir Selatan 2021–2026. Sinkronisasi tertinggi ditemukan pada Tujuan 14 (Ekosistem Lautan) dengan 5 dari 10 target, diikuti Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) dengan 6 dari 10 target. Sementara itu, Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab) menunjukkan sinkronisasi terendah, yaitu hanya 3 dari 11 target.

Tabel 1. Ringkasan Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dengan Target SDGs

No	Tujuan SDGs	Jumlah Target	Tersinkronisasi	Tidak Sinkron	% Sinkron
1	SDGs 6 – Air Bersih dan Sanitasi Layak	8	4	4	50,00%
2	SDGs 11 – Kota dan Permukiman Berkelanjutan	10	6	4	60,00%
3	SDGs 12 – Konsumsi & Produksi Bertanggung Jawab	11	3	8	27,27%
4	SDGs 13 – Penanganan Perubahan Iklim	5	4	1	80,00%
5	SDGs 14 – Ekosistem Lautan	10	5	5	50,00%
6	SDGs 15 – Ekosistem Daratan	12	5	7	41,67%
Total		56	27	29	48,21%

Sumber: Analisis penulis berdasarkan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021–2026

Target G6T1 (akses universal air minum yang aman) tersinkronisasi dengan indikator persentase penduduk berakses air minum layak yang pada tahun 2020 telah mencapai 94,88%, sementara G6T2 (sanitasi layak) tersinkronisasi dengan persentase rumah tinggal bersanitasi layak sebesar 75,27% pada baseline yang sama (RKPD Kabupaten Pesisir Selatan, 2022). Meski tersinkronisasi, terdapat kesenjangan konseptual mendasar antara standar layak yang digunakan dalam RPJMD dengan standar aman yang disyaratkan SDGs, yang berimplikasi pada penilaian capaian yang berbeda. Sementara G6T8 (partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi) tersinkronisasi melalui program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang dikoordinasikan Bapedalitbang.

Dalam Tujuan SDGs 11, target G11T5 (pengurangan risiko bencana) tersinkronisasi dengan indikator jumlah nagari tangguh bencana dalam Sasaran 6.1.2 RPJMD, yang ditargetkan meningkat dari kategori Pratama menuju Madya dan Utama. Target G11T6 (pengelolaan dampak lingkungan perkotaan) tersinkronisasi dengan indikator persentase pengelolaan sampah yang direncanakan meningkat dari baseline 38,46% pada 2020 menuju 100% pada 2026. Untuk Tujuan 13, target G13T1 (adaptasi terhadap bencana iklim) tersinkronisasi dengan program penanggulangan bencana, sementara G13T2 (integrasi kebijakan perubahan iklim) secara implisit tersinkronisasi dengan penetapan target IKLH yang meningkat dari 86,74 pada 2020 menuju 89,00 pada 2026 (RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, 2021).

Tujuan SDGs 14 menunjukkan kekayaan sinkronisasi yang tinggi mengingat potensi kelautan Kabupaten Pesisir Selatan. Target G14T7 (peningkatan manfaat ekonomi dari sumber daya laut) memiliki sinkronisasi paling kuat, tersinkronisasi dengan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap yang menargetkan produksi meningkat dari 35.549 ton (2021) menjadi 36.447 ton (2026) dengan total pagu anggaran Rp32,84 miliar selama periode RPJMD. Target G14T2 (perlindungan ekosistem laut dan pesisir) tersinkronisasi dengan program fasilitasi Pengembangan Habitat Jasa Dunia (PHJD) di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandeh (RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, 2021). Untuk Tujuan 15, target G15T1 tersinkronisasi dengan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) berinsiatif dari Rp1 miliar (2021) hingga Rp2,2 miliar (2026), sementara G15T9 (integrasi nilai ekosistem

dalam perencanaan) tersinkronisasi melalui penyusunan dokumen KLHS RPJMD yang memuat penilaian 20 jasa ekosistem.

Realisasi Target SDGs Pilar Lingkungan dalam RPJMD

Realisasi target SDGs pilar lingkungan yang tersinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dianalisis dari dokumen LKIP, LPPD, dan LKPJ. Untuk SDGs 6, persentase penduduk berakses air minum layak pada tahun 2021 mencapai 95,59% dari target 95,50%, dengan capaian 99,35%. Namun Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2022 tercatat hanya 66,83 dari target 90,00, yang diperoleh dari pemantauan 8 sungai dengan parameter DO, BOD, COD, TSS, dan Fosfat, mencerminkan tantangan dalam pengelolaan kualitas air permukaan (LKIP Kabupaten Pesisir Selatan, 2022).

Tabel 2. Realisasi Indikator SDGs G6 Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator	Baseline 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	94,88%	95,50%	95,59%	99,35%
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	75,27%	75,49%	*	*
Indeks Kualitas Air (IKA)	90,00	90,00	66,83 (2022)	*

**) Data tidak tersedia secara eksplisit dalam dokumen laporan kinerja.*

Sumber: RKPD 2022 dan LKIP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Untuk SDGs 11, capaian paling representatif adalah indikator jumlah nagari tangguh bencana yang pada tahun 2022 hanya mencapai 47 dari 182 nagari atau 25,82% dari target. Rendahnya capaian ini disebabkan tingginya standar 20 indikator nagari tangguh bencana sesuai Perka BNPB No. 1/2012 yang harus dipenuhi secara kumulatif. Sementara itu, IKLH Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 tercatat 77,94, berada di bawah target 86,85, dengan rincian IKA=66,83, IKU=92,43, dan IKTL=70,21, menempatkan Kabupaten Pesisir Selatan pada kategori “Baik” berdasarkan perbandingan regional Sumatera Barat (LKIP Kabupaten Pesisir Selatan, 2022).

Tabel 3. Realisasi Indikator SDGs G11 dan G13 Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Nagari Tangguh Bencana (G11T5/G13T1)	2022	182 nagari	47 nagari	25,82%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	2022	86,85	77,94	89,74%
Indeks Reformasi Birokrasi (proksi tata kelola)	2023	60,5	71,56	118,28%
Persentase Kebijakan Pembangunan searah RPJMD	2021	87%	100%	114,94%

Sumber: LKIP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dan 2023; LKPJ Bapedalitbang Tahun 2021.

Capaian yang paling menonjol ditemukan pada SDGs 14, khususnya melalui produksi perikanan tangkap. Pada tahun 2023, produksi perikanan tangkap mencapai 58.405 ton dari target 35.906 ton, menghasilkan capaian 162,66%, yang didorong oleh bantuan alat tangkap berupa perahu jukung, mesin tempel, serta dukungan APBD dan DAK (LKIP Kabupaten Pesisir Selatan, 2023). Pencapaian ini menunjukkan konsistensi positif selama tiga tahun berturut-turut. Sementara itu, realisasi anggaran program PHJD di KSPN Mandeh pada 2021 mencapai Rp105,44 juta dari pagu Rp131,86 juta (79,97%), menunjukkan kinerja yang masih belum optimal (LKPJ Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, 2021).

Tabel 4. Capaian Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Pesisir Selatan (G14T7)

Tahun	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Capaian (%)
2021	35.549	35.549	100,00%
2022	35.727	35.907	100,50%
2023	35.906	58.405	162,66%

Sumber: LKIP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Untuk SDGs 15, Program KEHATI telah dianggarkan secara bertahap (Rp1 miliar pada 2021 hingga Rp2,2 miliar pada 2026), namun indikator persentase luasan KEHATI yang dikelola tidak tersaji realisasinya dalam dokumen LKIP, LPPD, maupun LKPJ. Berdasarkan triangulasi wawancara dengan pejabat Dinas Lingkungan Hidup, diperoleh informasi bahwa capaian program KEHATI secara aktual telah mencapai 45%, namun data ini tidak terdokumentasi dalam laporan kinerja formal. Hal ini mengkonfirmasi adanya kesenjangan antara pelaksanaan program di tingkat OPD dengan pelaporan kinerja formal di tingkat bupati.

Penilaian Kinerja Pencapaian Target SDGs Pilar Lingkungan

Berdasarkan analisis sinkronisasi dan realisasi di atas, penilaian kinerja pencapaian target SDGs pilar lingkungan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021–2026 dirangkum dalam matriks R-A-P-H. Dari 56 target SDGs pilar lingkungan, distribusinya ke dalam 5 kategori adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Matriks Penilaian Kinerja Pencapaian Target SDGs Pilar Lingkungan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021–2026

Kategori	Deskripsi	R	A	P	H	Jumlah Target	%
1	Target tidak direncanakan	0	0	0	00	29	51,79%
2	Direncanakan, tidak dianggarkan/diprogramkan	1	0	0	00	3	5,36%
3	Direncanakan, dianggarkan, diprogramkan, tidak diukur	1	1	1	00	9	16,07%
4	Direncanakan, dianggarkan, diprogramkan, diukur belum optimal	1	1	1	10	13	23,21%
5	Direncanakan, dianggarkan, diprogramkan, diukur optimal	1	1	1	11	2	3,57%
Total						56	100%

Keterangan: R=Rencana, A=Anggaran, P=Program, H=Hasil.

Sumber: Analisis penulis berdasarkan RPJMD, LKIP, LPPD, dan LKPJ Kabupaten Pesisir Selatan.

Kategori 1 mencakup 29 target (51,79%) yang tidak direncanakan sama sekali, umumnya karena keterbatasan kewenangan daerah, tidak relevannya target dengan konteks lokal, atau bersifat nasional/internasional. Kategori 2 mencakup 3 target (5,36%): G11T3 (urbanisasi inklusif), G13T5 (kapasitas perencanaan perubahan iklim), dan G15T9 (integrasi nilai ekosistem dalam perencanaan). Ketiga target ini disebutkan dalam arah kebijakan RPJMD, namun tidak diturunkan dalam program dan anggaran konkret, sebagian karena keterbatasan kapasitas kelembagaan yang dibutuhkan.

Kategori 3 mencakup 9 target (16,07%) yang telah direncanakan, dianggarkan, dan diprogramkan, namun hasil capaiannya tidak diukur secara sistematis. Sebagai contoh, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah dianggarkan dengan total Rp50,23 miliar untuk periode RPJMD, namun indikator persentase sumber daya perikanan yang terlindungi ditetapkan dengan baseline dan target nol sepanjang periode RPJMD, yang mengindikasikan belum dikembangkannya sistem pengukuran yang efektif (Van Dooren et al., 2010). Ini sejalan dengan temuan Guarini et al. (2022) bahwa kelemahan sistem pemantauan berbasis outcome merupakan hambatan struktural umum dalam implementasi SDGs di tingkat pemerintah daerah.

Kategori 4 mencakup 13 target (23,21%) yang telah diukur namun capaiannya belum optimal (<90% dari target), sementara Kategori 5 hanya mencakup 2 target (3,57%) yang diukur secara optimal, yaitu G11T5 (pengurangan dampak bencana) dan G14T7 (pemanfaatan ekonomi sumber daya laut). Kedua target ini mendapat perhatian yang cukup dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, dengan indikator yang relatif mudah diukur secara kuantitatif. Distribusi ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, integrasi SDGs pilar lingkungan ke dalam siklus perencanaan-penganggaran-pemrograman-pengukuran masih sangat perlu diperkuat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pencapaian SDGs Pilar Lingkungan

Berdasarkan analisis dokumen dan triangulasi wawancara, terdapat dua kelompok faktor yang mempengaruhi kinerja pencapaian target SDGs pilar lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan.

a) Faktor internal pemerintahan.

Proses penentuan prioritas pembangunan menjadi hambatan utama, di mana banyak target SDGs pilar lingkungan tidak masuk dalam RPJMD karena tidak dianggap sebagai prioritas mendesak dalam jangka lima tahun, sebagaimana dikonfirmasi pejabat Bapperida: 'tidak semua indikator SDGs dimasukkan ke dalam RPJMD. Karena dalam RPJMD sendiri sebenarnya indikatornya itu sudah ditetapkan oleh RPJMN'. Kondisi ini mencerminkan dominasi agenda perencanaan top-down yang mempersempit ruang lokalisasi SDGs, selaras dengan temuan Roge dan Lennon (2018). Selain itu, kesenjangan konseptual antara standar indikator SDGs global dengan indikator RPJMD yang lebih longgar—misalnya perbedaan standar air minum 'aman' versi SDGs dengan 'layak' versi RPJMD—berdampak signifikan pada interpretasi capaian. Keterbatasan SDM juga menjadi faktor relevan: pada tahun 2021, Bapedalitbang hanya memiliki 33 pegawai untuk menanggung seluruh tugas perencanaan lintas sektor (LKPJ Bapedalitbang, 2021). Keterbatasan data juga dikonfirmasi melalui pernyataan: 'Kabupaten tidak punya tools untuk mencari itu, misalnya emisi gas rumah kaca'. Keterbatasan kewenangan daerah, khususnya pengalihan urusan kelautan dari kabupaten ke provinsi sejak 2017, semakin mempersempit ruang gerak pemerintah kabupaten dalam memenuhi target-target SDGs 14.

b) Faktor eksternal.

Partisipasi masyarakat yang belum merata menjadi hambatan dalam pencapaian nagari tangguh bencana (47 dari 182 nagari pada 2022), mengingat tingginya standar keterlibatan komunitas yang harus dipenuhi. Keterbatasan fiskal daerah tercermin dari realisasi program koordinasi infrastruktur dan kewilayahan yang hanya mencapai 75,69% pada 2021 (LKPJ Bapedalitbang, 2021), dengan banyak program lingkungan bergantung pada transfer dana pusat seperti PAMSIMAS dan DAK. Kerentanan geografis terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan abrasi pantai turut mengganggu konsistensi pelaksanaan program lingkungan, sementara kondisi topografi berbukit meningkatkan biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan (Salvador, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan empat temuan utama. Pertama, dari 56 target SDGs pilar pembangunan lingkungan, terdapat 27 target (48,21%) yang tersinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021–2026. Sinkronisasi tertinggi terdapat pada SDGs 13 (80%) dan SDGs 11 (60%), sementara yang terendah pada SDGs 12 (27,27%). Tidak tersinkronisasinya 29 target lainnya disebabkan oleh keterbatasan prioritas, ketersediaan data, dan kewenangan daerah.

Kedua, realisasi target yang tersinkronisasi sangat bervariasi. Target G14T7 (produksi perikanan tangkap) menunjukkan capaian paling menonjol, dengan realisasi 162,66% pada tahun 2023. Sebaliknya, capaian nagari tangguh bencana (G11T5/G13T1) hanya 25,82% pada

2022. Kualitas air sungai (IKA=66,83) juga menunjukkan tantangan serius dalam urusan SDGs 6.

Ketiga, dari perspektif penilaian kinerja matriks R-A-P-H: 29 target (51,79%) tidak direncanakan, 3 target (5,36%) direncanakan namun tidak dianggarkan/diprogramkan, 9 target (16,07%) direncanakan namun tidak diukur hasilnya, 13 target (23,21%) diukur namun belum optimal, dan hanya 2 target (3,57%) diukur secara optimal—yaitu G11T5 dan G14T7.

Keempat, kinerja pencapaian dipengaruhi oleh faktor internal (proses prioritas pembangunan, kesenjangan konseptual indikator, komitmen dan kapasitas SDM, keterbatasan data, serta kewenangan daerah) dan faktor eksternal (partisipasi masyarakat, keterbatasan fiskal, kerentanan bencana, dan kondisi geografis). Penelitian ini merekomendasikan penguatan integrasi indikator SDGs lingkungan dalam RPJMD periode berikutnya, harmonisasi standar indikator, pengembangan sistem pelaporan kinerja berbasis *outcome*, serta eksplorasi mekanisme *green budgeting* dalam siklus perencanaan anggaran daerah.

REFERENSI

- Ariyadi, Y., & Syafruddin, M. (2013). Praktik-Praktik Manajemen Kinerja Pada Organisasi Sektor Publik Dan Hubungannya Dengan Kinerja Organisasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4).
- Bouckaert, G., & Halligan, J. (2008). *Managing performance: International comparisons*. Routledge.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- De Matteis, F., & Borgonovi, E. (2021). A Sustainability Management Model for Local Government: An Explanatory Study. *Administrative Sciences*, 11(4), 126. <https://doi.org/10.3390/admsci11040126>
- Elmizan, G. H. (2020). Pengukuran Kinerja Pencapaian Target Sustainable Development Goals Pilar Pembangunan Sosial Dalam RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021. Tesis. Universitas Andalas.
- Guarini, E., Mori, E., & Zuffada, E. (2022). Localizing the Sustainable Development Goals: a managerial perspective. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34(5), 583–601. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2021-0031>
- Gupta, A. K., & Sigdel, T. S. (2024). Integrating Sustainable Development Goals in local plans: Unlocking practices and challenges of local governments in Nepal. *Heliyon*, 10(20), e39615. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e39615>
- Haryono, S. (2018). *Manajemen Kinerja SDM Teori & Aplikasi*. Luxima Metro Media.
- Janjua, A., Attique, F., Raza, A., & Akbar, W. (2019). Effective performance management of local governments in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 68(1), 26–45. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-11-2017-0300>
- Krantz, V., & Gustafsson, S. (2021). Localizing the sustainable development goals through an integrated approach in municipalities: early experiences from a Swedish forerunner. *Journal of Environmental Planning and Management*, 64(14), 2641–2660. <https://doi.org/10.1080/09640568.2021.1877642>
- Kusuma, C. A., & Yani, I. A. (2023). Integrasi SDGs Pilar Pembangunan Sosial Dan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 53–60.
- Leavesley, A., Trundle, A., & Oke, C. (2022). Cities and the SDGs: Realities and possibilities of local engagement in global frameworks. *Ambio*, 51(6), 1416–1432. <https://doi.org/10.1007/s13280-022-01714-2>
- LKIP Kabupaten Pesisir Selatan. (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022*. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

- LKIP Kabupaten Pesisir Selatan. (2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- LKPJ Bapedalitbang. (2021). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan.
- LPPD Kabupaten Pesisir Selatan. (2022). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Locke, E. A. (2013). *New Developments in Goal Setting and Task Performance*. Routledge.
- Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemerintah Republik Indonesia.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.
- Purvis, B., Mao, Y., & Robinson, D. (2019). Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins. *Sustainability Science*, 14(3), 681–695.
- RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Roge, K. M., & Lennon, N. J. (2018). A study on the criteria of internal transparency, efficiency and effectiveness in measuring local government performance. *Financial Accountability & Management*, 34(4), 392–409. <https://doi.org/10.1111/faam.12176>
- Salazar, K., Church, S. P., Prokopy, L., Ma, Z., Beaulieu, L., & Phillips, R. (2025). The need for proactive environmental planning in local government: Examining challenges and pathways forward in Indiana. *Community Development*, 56(2), 192–220. <https://doi.org/10.1080/15575330.2024.2382207>
- Salvador, M., & Sancho, D. (2021). The Role of Local Government in the Drive for Sustainable Development Public Policies. An Analytical Framework Based on Institutional Capacities. *Sustainability*, 13(11), 5978. <https://doi.org/10.3390/su13115978>
- Siregar, I. (2022). Analisis Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023. Universitas Medan Area.
- Syafaruddin. (2024). Analysis Of The Role Of Local Governments In Sustainable Development In Urban Areas. *Digital Innovation: International Journal of Management*, 1(4), 212–226. <https://doi.org/10.61132/digitalinnovation.v1i4.119>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Republik Indonesia.
- Van Dooren, W., Bouckaert, G., & Halligan, J. (2010). *Performance Management in the Public Sector*. Routledge, Taylor and Francis Group.
- Wahyuddin, M. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2010-2015 Bidang Pendidikan Dan Bidang Kesehatan. *Jurnal Paradigma*, 5(1), 1–10.
- World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.